RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2022



SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2021

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Jl. Wolter Monginsidi No. 1 Tenggarong Telp. 0541-661180 Fax 0541-661586 Kode Pos 75511

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT. atas karuniaNya yang tak terhingga, sehingga Sekretariat DPRD Tahun 2021 menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu strategis didalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini akan dapat dijadikan sebagai dasar acuan Rencana Kerja Tahun 2022 dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Didalam Renja mengacu kepada kebijakan Perangkat Daerah dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2022 upaya yang dilakukan dalam

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

mewujudkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, transparan dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat atau anggota DPRD Kutai Kartanegara.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah disusun ini masih belum sempurna terutama untuk menjawab berbagai permasalahan aktual yang akan terjadi kedepan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat diperlukan berbagai kajian yang mendalam dengan sumbangan pemikiran masukan dan saran dari semua pihak, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat berjalan dengan baik dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat didalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan RahmatNya kepada kita sekalian. Aamiin...

Tenggarong, Februari 2021

Sekretaris, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

H.M. Ridha Darmawan, SP.MP.

Pembina Utama Muda NIP. 19701117 199803 1 008

DAFTAR ISI

Kata F	Penga	ntar	i
Daftar	: Isi		iii
BAB	I	PENDAHULUAN	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	9
		1.3 Maksud dan Tujuan	11
		1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	18
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	18
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	54
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	56
		2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	57
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	73
BAB	III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	75
		3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	75
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	78
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	80
		4.1 Program dan Kegiatan	80

BAB	V PEN	TUTUP	101
	5.1	Catatan Penting	101
	5.2	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	101
	5.3	Rencana Tindak Lanjut	104

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 **Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode I (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kartanegara. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat.Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Renja Perangkat Daerah tidak lain adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun, dan kongkritnya adalah merupakan dokumen yang berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 (satu) tahun kedepan karena Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk bersama-sama dalam menentukan kebijakan Pemerintah Daerah berbasis potensi Sumber Daya Daerah, aspirasi masyarakat serta kepentingan yang selaras dengan kebutuhan daerah.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintah dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui lembaga perwakilan, lembaga politik dan lembaga informal masyarakat karena pada intinya negara demokratis menyebutkan bahwa demokrasi pada arus lokal cukup memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan demokrasi pada tingkat nasional Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan antar sektor mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi,

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

sosial budaya, ideologi dan situasi kondusif daerah dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada pelaksanaan pembangunan RPJMD 2016-2021.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewansecara teknis operasional yang bertugas memberikan pelayanan kepada DPRD dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Kepala Bagian Umum, membawahkan:
 - Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - Sub bagian Rumah Tangga;
 - Sub bagian Perlengkapan
- c. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:
 - Sub bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - Sub bagian Verifikasi;

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan
- d. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan:
 - Sub bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - Sub bagian Fasilitasi Pengawasan;
 - Sub bagian Kerjasama dan Aspirasi
- Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan membawahkan: e.
 - Sub bagian Persidangan dan Risalah;
 - Sub bagian Perundang-Undangan;
 - Sub bagian Humas, Protokol dan Publikasi
- f. Jabatan Fungsional.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok menyelengarakan administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksaanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengorganisasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; b.
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan c.
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretaris Dewan mempunyai tugas:

- Membantu Kepala Daerah secara administrasi sesuai dengan Bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah;
- Membantu dan bertanggung jawab secara operasional terhadap pimpinan DPRD;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi pelayanan secara operasional terhadap DPRD;
- Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan bawahannya;
- Mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan urusan Sekretariat DPRD;
- Merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis di Bagian Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut Bidang tugasnya;
- Merumuskan kegiatan sekretariat DPRD yang meliputi Bagian Tata Usaha, Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan Persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Merumuskan sasaran penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD;

- Mengorganisasikan penyusunan RENJA Tahunan Sekretariat DPRD;
- Mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Sekretariat, melaporkan kepada kepala Daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke bagian Administrasi Organisasi;
- Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengkoordinasikan penyusunan program Sekretariat DPRD dengan memberikan arahan kepada kapala bagian mengacu pada RPJPD,
- RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
- Merumuskan rencana strategis kebijakan operasional Sekretariat DPRD;
- Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mendokumentasikan kegiatan DPRD;
- Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis kebijakan operasional Sekretariat DPRD;
- Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD;



Rencana Kerja OPD merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan, dalam 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai langkah awal, kegiatan melalui penetapan indikator kinerja Rencana Kerja OPD merupakan salah satu evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahuisejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selaras dengan programdan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja.

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
- 4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah Kab. Kutai Kartanegara
- 15. Perbup No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah Kab. Kutai Kartanegara
- 17. Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai tindak lanjut guna mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah seperti yang diatur dalamUndang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada dasarnya kewenangan daerah telah ditetapkan dalam Undang – undang tersebut. Menyadari bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, namun demikian dengan merujuk Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Junco PP Nomor 24 Tahun 2004 junco PP Nomor 58 Tahun 2005, maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan menjadi kewajiban setiap Institusi dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya setiap tahun anggaran.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dasar dalam realisasi program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat DPRD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

2.1

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2/2020) dan perkiraan capaian tahun

Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

berjalan (tahun n-1/2021), mengacu pada APBD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan Realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan realisasi APBD untuk PD.

Pokok-pokok materi yang disajikan bab ini :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan

- e. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD
- f. Kebijakan atau tidaknya perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatsi faktor-faktor penyebab tersebut.
- g. Tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pencapaian Renstra PD Tahun Berjalan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan IKK dan table T-C.30 Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahBerisikan uraian mengenai:
 - 1. Tingkat kinerja pelayanan PD
 - Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
 - 3. Dampaknya terhadap capaian program nasional
 - 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
 - 5. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang Strategis dalam program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD/Renstra PD (tahun 2021).
- 2. Penjelasan mengenai proses
- 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- Melampirkan tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
 2021

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai:

- Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD/ Renstra PD (tahun 2021).
- 2. Penjelasan mengenai proses
- 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 4. Melampirkan tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.2

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PROGRAM KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal RKPD / Renstra baik jenis program / Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB V. **PENUTUP**

Catatan penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan Membahas Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya dan capaian indikator kinerja penilaian pencapaian target

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2.1 Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang ini dalam rangka memfasilitasi kegiatankegiatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana kerja suatu OPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis OPD tersebut. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayananSekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah KabupatenKutai Kartanegara, Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja adalah suatu gambaran yang disampaikan melalui hasil evaluasi indikatorindikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja

tercapainya evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu maksud yaitu (tahun n-2/2020) dan pelaksanaan capaian tahun 2020 dalam tabel yang dimaksud (tahun n-1/2021) yang mengacu pada APBD tahun 2021 berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan kepada hasil input dan output Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pencapaian target Renstra, berdasarkan hasil rencana kerja OPD tahun 2020 dengan review hasil pelaksanaan Renja OPD tahun 2020 dan realisasi Renstra OPD 2016-2021 yang dicapai dengan evaluasi yang mengacu pada realisasi APBD.

Realisasi dan rekaspitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dan Pencapaian Renstra akan disajikan dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut

Tabel T-C.29. Rekapitulsi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD S/d Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat DPRD

			Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja	Kinerja F	et dan Reka Program dan nun Lalu (2	n Kegiatan	Target Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra - PD s/d Tahun berjalan (2021)	
Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Program (Renstra - PD) Tahun 2016 - 2021	Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja- PD Tahun (2020)	Realisasi Renja - PD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan (Renja - PD tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran								

Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	875	800	800	250	31%	0	1050	120%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan	12	48	48	48	100%	0	96	800%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		17	0						0%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang	55	56	56	0	0%	0	56	102%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan		11644	12	12	100%	0	11656	
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Buah	7057	4028	4028	5155	128%	0	9183	130%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah exemplar	157896	38352	38352	28392	74%	0	66744	42%
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi / kaleng / kemasan	13880	9504	9504	6470	68%	0	15974	115%

1163% 100% 1895 0 Jumlah Bulan /Orang Penyediaan jasa administrasi 179 1716 1716 Teknis Perkantoran 37% 191693 32% 0 188513 Penyediaan barang cetakan Jumlah Lembar / 606464 3180 507450 dan penggandaan Jenis 65% 0 359 85% Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah Orang / hari 420 218 218 141 konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah 700% 100% 0 Penyediaan Perlengkapan 2 5 5 Jumlah event/M2 Kegiatan Hari - Hari Tertentu Pengelolaan keamanan Jumlah Orang komplek kantor dan Rumah Pimpinan 100% 50 100% 0 50 30 20 20 Jumlah Orang Pamdal Sekretariat DPRD

Jumlah Orang

Penyediaan Jasa Keamanan

Dan Ketertiban lingkungan

Sekretariat DPRD

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah Barang	4	4	28	700%		32	
Penataan dan pengelolaan kearsipan	Jumlah Kegiatan							
Penataan arsip dan pengadaan bahan penunjang kearsipan								
Seleksi Penerimaan Tenaga Ahli/ Tim Ahli	Jumlah Orang		11	11	100%	0	11	
Jasa Pemeliharaan Halaman dan Taman Kantor Rumah Jabatan dan Sarana Olah Raga	Jumlah Bulan							
Pengelolaan administrasi anggota DPRD	Jumlah Kegiatan		2	7	350%	100	107	

Program Peningkatan Sarana Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik 1756 1405% 39% 0 Pengadaan perlengkapan Jumlah Unit / Paket / 125 1081 1740 675 gedung kantor Jenis / item 101% 618 293% Pengadaan peralatan gedung Jumlah Paket / Jenis 211 308 308 310 kantor 0% 0 0 Pengadaan mebeleur 0 Jumlah Buah 1 40% 0 66 132% 50 47 47 19 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Unit kendaraan dinas/operasional 2750% 114 2850% 0 110 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Unit/Rumah 4 rumah jabatan Jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah jabatan	Jumlah Unit								
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Unit/Rumah Jabatan	160	100				0	100	63%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit	9	10	10	10	100%	0	20	222%
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Buah	767	100	47	47				
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Set/Unit	767	595	595	310	52%	0	905	118%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas dan gedung kantor	Jumlah Unit								

Pengadaan kendaraan dinas operasional Roda Empat	Jumlah Unit		8	12	150%	0	12	
Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Unit							
Penilaian dan Inventarisasi Aset	Jumlah Set/Unit	1				0	1	
Desain RehapBerat Rumah Jabatan Pimpinan	Jumlah Dokumen							
Renovasi sedang Rumah Pimpinan DPRD	Jumlah Unit							
Pasilitasi Penyiapan Tempat Sarana Rapat Dan Pertemuan	Unit/Paket/Jenis/Item							
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah Unit		100	265	265%	0	265	

Pembuatan Jembatan Dari Ruang Paripurna dan Toilet Untuk Pimpinan	Jumlah Unit								
Infentarisasi dan Kode Pikasi Barang milik daerah dilingkungan Sekretariat DPRD	Jumlah Set/Unit								
Program Peningkatan Disipilin Pegawai	Jumlah Pelanggaran Disiplin								
Pengadaan pakaian dinas	Jumlah Steell	220	45				0	45	20%
beserta perlengkapannya									
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Event	270		861	497	58%	0	497	184%

Pengadaan Pakaian PSL,PSR,PSD Beserta Kelengkapanya	Jumlah Steell							
Pengadaan Pakaian Dinas Olahraga Humas Protokol DPRD	Jumlah Steell		30	102	340%	0	102	
Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Berserta Kelengkapanya	Jumlah Steell							
Program Peningkatan	Rata Rata Nilai							
Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja SKP							

Fasilitasi Bekias	Jumlah Inovasi	15	15	15	100%	0	30	
Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Orang							
Pendidikan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah Orang		108	51	47%	0	51	
Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Orang							
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Konsistensi Rentra dan Renja							
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	Jumlah Dokumen	6	6	6	100%	0	12	
Penilaian Layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen	1	1	1	100%	0	2	

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen		5	5	100%	0	5	
Revisii penyusunan rencana strategis								
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	0				0	0	
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 - 2020	Jumlah Dokumen	1				0	0	0%
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen	1				0	0	0%
Penyusunan LAKIP / LKjIP Set. DPRD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	30				0	0	0%
Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Set. DPRD Kab. Kutai Kartanegara.	Jumlah Dokumen	1				0	0	0%

Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Jumlah Dokumen	40			0	0	0%
Penyusunan pelaporan TAPKIN,LAKIP/LKPJ	Jumlah Dokumen						
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Set. DPRD Kab. Kukar Tahun 2016.	Jumlah Dokumen	40			0	0	0%
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2016.	Jumlah Dokumen	40			0	0	0%
Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen						
Peningkatan Penatausahaan dan Verivikasi Pembukuan	Jumlah Dokumen		4		0	4	

Asdeksi (Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota Seluruh Indonesia)	Jumlah Kegiatan		22		0	22	
Peningkatan Penatausahaan Perbendaharaan	Jumlah Dokumen		3		0	3	
Kegiatan Fasilitasi Rakor Sekretaris DPRD Se-Kaltim	Jumlah Kegiatan						
Study Komperatif Penyusunan APBD/APBD-P Set. DPRD	Jumlah Dokumen	1			0	0	0%
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Set.DPRD Thn 2016	Jumlah Dokumen	6			0	0	0%
Kegiatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Set. DPRD	Jumlah Kegiatan	2			0	0	0%

Seminar, Workshop dan Lokakarya	Jumlah Kegiatan	142			0	0	0%
Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Status Barang Milik Daerah Dilingkungan Set. DPRD.	Jumlah Laporan						
Inventarisasi dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dilingkungan Set. DPRD Kab. Kutai Kartanegara.	Jumlah Unit						
Penyusunan DKBMD - DKPBMD dilingkungan Set. DPRD Kab. Kutai Kartanegara.		1			0	0	0%
Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa	Jumlah Media Massa dan Elektronik						

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Peliputan Kegiatan dan Pengelolaan Website DPRD Kutai Kartanegara	Jumlah Kali						
Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kukar	Jumlah Kali	24			0	0	0%
Press Gathering	Jumlah Kegiatan	2			0	0	0%
Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen						
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen	1			0	0	0%
Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen						
Penyusunan pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen	0			0	0	

Fasilitasi temuan BPK dan Inspektorat		1				0	1	
Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prakasa DPRD dan Produk Hukum Daerah	Jumlah Naskah Akademis							
Koordinasi & Konsultasi Perpajakan	Jumlah Dokumen							
Fasilitasi Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Dokumen							
Pokok Kebijakan Sekretarit DPRD	Jumlah Orang							
Fasilitasi Hasil Temuan Pemeriksaan								
Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim TP4D	Jumlah Laporan		5	4	80%	0	4	

Penyusunan Laporan Keuangan Semester & Tahunan	Jumlah Dokumen	1	1	100%	0	1	
Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen						
Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2020	Jumlah Dokumen	6	6	100%	0	6	
Penyusunan SOP Layanan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen						
Pengelolaan Administrasi Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan	2	7	350%	0	7	
Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS, APBD dan APBD-P	Jumlah Laporan	3	2	67%	0	2	
Fasilitasi Pembahasan LKPJ dan Rancangan Pertanggungjawab APBD Serta Tidak lanjut hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan						
BPK							

Konsultasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD dengan Tim	Jumlah Laporan		5	4	80%	0	4	
TP4D Peliputan, Website dan Media Massa	Jumlah System Website		9	9	100%	0	9	
Fasilitasi Penjaringan Aspirasi	Jumlah Kali		3	3	100%	0	3	
Fasilitasi Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kali							
Fasilitasi Pelayanan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan	10	35	37	106%	0	47	
Rekonsiliasi Pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Laporan Kineja		1	1	100%	0	1	
Rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Laporan BMD		1	1	100%	0	1	
Penyusunan dokumen reformasi birokrasi sekretariat DPRD								

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Fasilitasi Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Dokumen			85	85	100%	0	85	
Koordinasi & Konsultasi Perpajakan	Jumlah Dokumen			2	2	100%	0	2	
Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Rapat Rapat Dewan								
Rapat-rapat paripurna	Jumlah Rapat	52	75	75	75	100%	0	150	288%
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Rapat	35	240	240	203	85%	0	443	1266%
Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi	Jumlah Rapat dan Kunjungan		85	85	85	100%	0	170	
Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 2	Jumlah Rapat dan Kunjungan		27	27	66	244%	0	93	
Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 3	Jumlah Rapat dan Kunjungan		35	35	52	149%	0	87	

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rapat-rapat dan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Komisi 4	Jumlah Rapat dan Kunjungan		35	35	134	383%	0	169	
Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Jumlah Orang		4	45	125	278%	0	129	
kapasitas Anggota DPRD	Jumlah Orang		4				0	4	
Rapat - Rapat dan Kunjungan Kerja bagi Pimpinan	Jumlah Laporan		41	12	49	408%	0	90	
Desiminasi, Sosialisasi dan Uji Pablik Raperda dan Non Raperda	Jumlah Raperda / Non Raperda								
Rapat - Rapat Koordinasi bagi Pimpinan	Jumlah Kali	11					0	0	0%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Anggota DPRD		9					0	0	0%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar Daerah Anggota DPRD									

1 1	I		1	İ	İ	1	İ	l	I	Ì
Ka	ajian Kebijakan Publik Pansus	Jumlah Raperda								
DF	PRD dan Produk Hukum	Menjadi Perda								
Da	aerah									
Pe	enyusunan Rancangan	Jumlah Kegiatan								
Pe	eraturan Kepala Daerah Hak									
Ke	euangan dan Administrasi									
Pir	mpinan dan Anggota DPRD									
KC	ONSULTASI DAN									
KC	OORDINASI									
PE	EMERINTAHAN DAN									
KE	EMASYARAKATAN									
Pe	embuatan aplikasi informasi									
pro	oduk DPRD									
Ins	speksi Mendadak (SIDAK)		2					0	0	0%
DF	PRD dalam rangka									
ре	engawasan pelaksanaan									
ре	embangunan di daerah									
Uji	ji Publik Raperda dan Produk	Jumlah Raperda		24	4	4	100%	0	28	
Hu	ukum Daerah									
Pe	enyusunan Naskah Akademis	Jumlah Raperda		4	4	4	100%	0	8	
Ra	aperda Prakasa DPRD dan									
Pro	roduk Hukum Daerah									

Rapat - Rapat dan Kunjungan			20				0	20	
Kerja Pansus DPRD									
Desiminasi, Sosialisasi Uji	Jumlah Raperda /								
Pablik Raperda dan produk	Non Raperda								
hukum Daerah									
Study komperatif pansus	Jumlah Kali	Kegiatan					0	0	
raperda ,inisiatif da non raperda									
Hearing/dialog dan koordinasi	Jumlah Hearing	Dokumen	250	250	226	90%	0	476	
dengan pejabat pemerintah	/Dialog								
daerah dan tokoh									
masyarakat/tokoh agama									
Reses Anggota DPRD	Jumlah Reses	Kegiatan	3	3	3	100%	0	6	
Fasilitasi Penjaringan Aspirasi	Jumlah Kecamatan		45				0	45	
Penyediaan dan									
Pengembangan Sistem									
Informasi Pengaduan									
Masyarakat									
Konsultasi dan Koordinasi	Jumlah Notulen		17				0	17	
Sekretariat DPRD dengan Tim									
TP4D									

Penyusunan raperda prakarsa	Jumlah Raperda							
dan non raperda								
Seminar, Workshop dan	Jumlah Orang							
Lokakarya								
Fasilitasi Pelayanan	Jumlaj							
Keprotokoleran Pimpinan dan	Kali/Kunjungan							
Anggota DPRD								
Peliputan Kegiatan dan	Jumlah System	1				0	1	
Pengelolaan Website DPRD	Website							
Kutai Kartanegara								
Penyebarluasan Informasi	Jumlah Media Massa	8	8	26	325%	0	34	
Kegiatan DPRD Pada Media	dan Elektronik							
Massa								
Peliputan Kegiatan dan	Jumlah System	1	1	1	100%	0	2	
Pengelolaan Website DPRD	Website							
Kutai Kartanegara								
Koordinasi Pelaporan Data								
Rencana Aksi Nasional								
RANHAM								
Sistem Aplikasi Pengaduan								
Masyarakat								

1	1	i	i	i	İ	i	İ	İ
Tim Evaluasi Tunjangan								
Perumahan Anggota DPRD								
Fasilitasi Pengawasan DPRD	Jumlah Dokumen		1	1	100%	0	1	
Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi DPRD	Jumlah Dokumen		1	1	100%	0	1	
Rapat Koordinasi FKPD dan Masyarakat	Jumlah Kali		2	18	900%	0	18	
Penegakan Kode Etik DPRD	Jumlah Kali		4	4	100%	0	4	
Fasilitasi temuan BPK dan Inspektorat								
Fasilitasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen		1	2	200%	0	2	
Rapat - rapat kerja BK	Jumlah Rapat		12	12	100%	0	12	
Rapat - rapat kerja Bapemperda	Jumlah Rapat		10	25	250%	0	25	
Rapat - rapat kerja Banmus	Jumlah Rapat		10	10	100%	0	10	

Rapat - rapat kerja Banggar	Jumlah Rapat		8	12	150%	0	12	
Rapat Koordinasi FKPD dan	Jumlah Kunjungan							
Masyarakat	/Kali							
Penyediaan tenaga ahli,tim ahli dan nara sumber Set.DPRD Kab.Kukar	Jumlah Orang		27	27	100%	0	27	
Pemilihan Wakil Kepala Daerah								
Program Pengembangan data/informasi								
Website DPRD kutai kartanegara	Jumlah System Website							
Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Pada Media Massa	Jumlah Media Massa dan Elektronik	0						
Pembuatan aplikasi informasi produk DPRD								
Press Gathering	Jumlah Kegiatan							
Peliputan kegitan pimpinan dan anggota DPRD		0						

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Prosentase				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		1200%	12	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		2	2	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen		1	1	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen		2	2	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen		1	1	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen		2	2	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen		2	2	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		2	2	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD			12 Bulan		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen			2	2	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen			6	6	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen			6	6	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen			6	6	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen			12	12	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			1	1	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen			1	1	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang			108	108	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan					0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Buah			4028	4028	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi/kaleng/kemasan			9504	9504	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar			3180	3180	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar			38352	38352	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis			308	308	

Pengadaan Sarana Prasarana Penduku Kantor atau Bangu	ung Gedung			1081	1081	
Penyediaan Jasa F Urusan Pemerinta		n				
Penyediaan Jasa Su	urat Menyurat Jumlah Surat			800	800	
Penyediaan Jasa Ko Sumber Daya Air d				48	48	
Penyediaan Jasa Pe Umum Kantor	elayanan Jumlah Orang/Bul	an		384	384	
	Jumlah Orang/Bul	lan		480	480	
	Jumlah Orang/Bul	an		1476	1476	
Pemeliharaan Bar Daerah Penunjang Pemerintahan Dae	g Urusan	n				
Penyediaan Jasa Pe Biaya Pemeliharaar Kendaraan Perorar atau Kendaraan Dii	n dan Pajak ngan Dinas			47	47	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit			47	47	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit			4	4	
Laiiiiya	Jumlah Unit			100	100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Set/Unit			595	595	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Dokumen					
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianyan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD			12	12	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Stel			135	135	
	Jumlah Stel			385	385	
Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen					
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat			24	24	

				_		
	Jumlah Rapat			75	75	
	Jumlah Rapat			250	250	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Rumah Tangga			4	4	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Prosentase					
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Prolegda					
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat			10	10	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda			24	24	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Raperda			1	1	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen			4	4	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen					
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen			2	2	

Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen		2	2	2	
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen		1		1	
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen		1		1	
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen		1		1	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen		1		1	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen					
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang	Jumlah Dokumen		1		1	
Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Layanan		3	36	36	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Dokumen		1		1	
Infrastruktur	Jumlah Layanan		3	86	36	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Dokumen		1		1	
Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Layanan		3	36	36	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Dokumen		1		1	
Perekonomian	Jumlah Layanan		3	36	36	

Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen					
Publikasi dan Dokumentasi	Jumlah Berita			8	8	
Dewan	Jumlah Kegiatan			1	1	
	Jumlah Kegiatan			2	2	
Penyediaan Kelompok Pakar	Jumlah Orang			120	120	
dan Tim Ahli	Jumlah Orang/Bulan			120	120	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang/Bulan			84	84	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen			1	1	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen					
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Rapat			4	4	
Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses			3	3	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen					
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen			1	1	
	Jumlah Layanan			36	36	
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen					

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan			12	12	
	Jumlah Orang/Hari			4	4	
	Jumlah Rapat/Kunjungan			288	288	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Kegiatan			1	1	

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektivitas kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mencapai tujuan, visi dan misi daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Mengingat Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mewujudkan pelayanan prima dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang **DPRD** dan Misi ditetapkan adalah membantu **DPRD** dalam yang menyelenggarakan tugas dan wewenang, mewujudkan hubungan kerjasama antara Pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan pelayanan dan fasilitasi kegiatan rapat-rapat Dewan, maka sulit menentukan tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji. Namun demikian kami mencoba menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan berdasarkan target capaian pada tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan berikut :

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

		SPM / Standa		r	Target Re	enstra - P	D	Realisas	i Capaiar	n Pro	oyeksi	
	Indikator *)	r Nasion al	IKK	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	Ada / Tidak	Keputusa n DPRD yang ditindakla njuti .	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan x 100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu strategis dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah DaerahBerdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak di antisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal, Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud memberikan panduan langkah-langkah kinerja yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan Indikator Kerja Utama pada berbagai tingkatan organisasi.

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- a. Peningkatan peran sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD yang akuntabel.
- b. Peningkatan sistem, dan prosedur kerja yang efisien, efektif, sinergis dan akuntabel di tunjang sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
- d. Mendapatkan informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Karatanegara.
- Mendapatkan ukuran keberhasilan dalam capaian suatu tujuan untuk e. perbaikan kinerja.
- f. Serta keterkaitan antara kebijakan yang dilaksanakan dengan visi dan misi yang tertuang dalam renstra Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Karatanegara Dalam rancangan ini perangkat daerah harus menjabarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan sasaran dan indikator dalam RPJMD yang akan diselaraskan dengan RENSTRA dan diturunkan dalam perencanaan tahunan dalam RENJA OPD, kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui didalam pelaksanaan APBD tahun 2021, memang beberapa usulan yang diajukan didalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana awal yang ditetapkan dikarenakan adanya beberapa perubahan-perubahan dalam mewujudkan target dan sasaran pembanguanan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, adapun program dan kegiatan masyarakat karena tupoksinya tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Dewan baik secara langsung maupun usulan masyarakat dalam kegiatan Reses DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 guna mendukung target dan capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.31 **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022** Kabupaten Kutai Kartanegara

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

					Ranca	angan Awal	RKPD			Hasil A	nalisis Keb	utuhan		
	Kode 1		Program / Kegiatan	Lokas Indikator Kinerja Program Target Pagu Indikatif Program Capaian (Rp.) Frogram Kegiatan Kegiatan Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiata n /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT				106,581,786,414	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT				106,581,786,414	
4				DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				72,794,861,815	DPRD				72,794,861,815	

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,261,066,663	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,261,066,663	
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	169,279,663	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	169,279,663	
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	125,526,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	125,526,000	
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	163,354,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	163,354,000	
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	217,478,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	217,478,000	
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	165,430,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	165,430,000	

4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	250,101,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	250,101,000	
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	169,898,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	169,898,000	
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21,208,767,507	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21,208,767,507	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Bulan	12 Bulan	19,912,653,507	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah Bulan	12 Bulan	19,912,653,507	Gaji ASN
4	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	128,832,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	128,832,000	
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	119,728,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	672 Dokumen	119,728,000	
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	138,926,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	138,926,000	

4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	858,628,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	18 Dokumen	858,628,000	
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				279,394,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				279,394,000	
4	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	279,394,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	279,394,000	
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				369,301,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				369,301,000	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kukar	Jumlah Stel	305 Stel	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kukar	Jumlah Stel	311 Stel	0	
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kukar	Jumlah ASN	108 ASN	369,301,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kukar	Jumlah ASN	50 ASN	369,301,000	
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan Sosialisa si	15 Kegiatan Sosialisasi	0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Kukar	Jumlah Inovasi	1 Inovasi	0	

4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Kukar	Jumlah Orang	20 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Kukar	Jumlah Orang	20 ASN	0	
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,908,680,400	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,908,680,400	
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Unit	4028 Unit	664,515,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Unit	4028 unit	664,515,400	
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah porsi/kale ng/kemas an	9504 porsi/kale ng/kemas an	1,110,292,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah porsi/kale ng/kemas an	9504 porsi/kalen g/kemasan	1,110,292,600	
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Lembar	3180 Lembar	457,059,300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Lembar	3180 Lembar	457,059,300	
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Kukar	Jumlah Eksempl ar	38352 Eksemplar	176,813,100	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Kukar	Jumlah Eksempl ar	38352 Eksemplar	176,813,100	
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Orang/Ha ri	218 Orang/Har i	350,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Orang/Ha ri	218 Orang/Hari	350,000,000	

4	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	150,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Nilai Tata Kelola	В	150,000,000	
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,457,713,092	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,457,713,092	
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit	308 Unit	604,904,200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit	308 Unit	604,904,200	
4	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit	1081 Unit	852,808,892	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit	1081 Unit	852,808,892	
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,836,753,898	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,836,753,898	
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah Surat	800 Surat	4,250,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah Surat	800 Surat	4,250,000	
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Rekening	48 Rekening	1,924,792,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah Rekening	48 Rekening	1,924,792,000	

4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Orang/Bu lan	2448 Orang/Bul an	5,907,711,898	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Orang/Bu lan	1584 Orang/Bul an	5,907,711,898	Gaji THL = 132 Orang * 12 Bulan (THR & BPJS)
													2 Paket		Gaji Pamdal dan Cleanin g Servis
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,911,486,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,911,486,000	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraa n Dinas	47 Kendaraa n Dinas	341,810,250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraa n Dinas	47 Kendaraan Dinas	341,810,250	

4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraa n Dinas	47 Kendaraa n Dinas	342,312,150	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraa n Dinas	47 Kendaraan Dinas	342,312,150	
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit	10 Unit	851,320,000	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Unit	10 Unit	851,320,000	
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Set/Unit	595 Set/Unit	376,043,600	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Set/Unit	595 Set/Unit	376,043,600	
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				30,887,959,655	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				30,887,959,655	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Bulan	12 Bulan	30,480,883,455	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Bulan	12 Bulan	30,480,883,455	Gaji DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Stel	520 Stel	407,076,200	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Stel	520 Stel	407,076,200	
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD				4,673,739,600	Layanan Administrasi DPRD				4,673,739,600	

4	2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	150,000,000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	150,000,000	
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	349 Rapat	3,267,656,600	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	349 Rapat	3,267,656,600	
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Rumah Tangga	4 Rumah Tangga	1,256,083,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Rumah Tangga	4 Rumah Tangga	1,256,083,000	
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				33,786,924,599	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				33,786,924,599	
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				5,946,826,000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				5,946,826,000	
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	10 Rapat	295,286,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	10 Rapat	295,286,000	
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Raperda	24 Raperda	419,366,000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Raperda	24 Raperda	419,366,000	
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Kab. Kukar	Jumlah Raperda	24 Raperda	4,201,628,000	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Kab. Kukar	Jumlah Raperda	24 Raperda	4,201,628,000	

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterang an dan/atau Naskah Akademik	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	1,030,546,000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterang an dan/atau Naskah Akademik	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	1,030,546,000	
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				1,050,000,000	Pembahasan Kebijakan Anggaran				1,050,000,000	
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	5 Rapat	375,000,000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	5 Rapat	375,000,000	
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	5 Rapat	375,000,000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	5 Rapat	375,000,000	
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	2 Rapat	100,000,000	Pembahasan APBD	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	2 Rapat	100,000,000	
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	2 Rapat	100,000,000	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	2 Rapat	100,000,000	
4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	2 Rapat	50,000,000	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	2 Rapat	50,000,000	
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	2 Rapat	50,000,000	Pembahasan Pertanggungjawaba n APBD	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	2 Rapat	50,000,000	
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				4,750,000,000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				4,750,000,000	

2	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	36 Pengawas an	750,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	36 Pengawas an	750,000,000	
2	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	36 Pengawas an	750,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	36 Pengawas an	750,000,000	
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	36 Pengawas an	750,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	36 Pengawas an	750,000,000	
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	36 Pengawas an	750,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	36 Pengawas an	750,000,000	
2	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	36 Pengawas an	750,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	36 Pengawas an	750,000,000	

4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	4 Pengawas an	400,000,000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	4 Pengawas an	400,000,000	
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	4 Pengawas an	400,000,000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	4 Pengawas an	400,000,000	
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	2 Rapat	200,000,000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n Kepala Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	2 Rapat	200,000,000	
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				5,924,447,000	Peningkatan Kapasitas DPRD				5,924,447,000	
4	2	2	2.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Orang	45 Orang	1,400,818,000	Bimbingan Teknis DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Orang	45 Orang	1,400,818,000	
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kukar	Jumlah Media	15 Media	2,169,458,000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kukar	Jumlah Media	15 Media	2,169,458,000	
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Kukar	Jumlah Orang	120 Orang	1,654,171,000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Kukar	Jumlah Orang	120 Orang	1,654,171,000	
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Kukar	Jumlah Orang	7 Orang	325,000,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Kukar	Jumlah Orang	7 Orang	325,000,000	
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000	

4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	175,000,000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	175,000,000	
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				4,047,972,142	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				4,047,972,142	
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	142,288,102	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	142,288,102	
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Kab. Kukar	Jumlah Reses	3 Reses	3,905,684,040	Pelaksanaan Reses	Kab. Kukar	Jumlah Reses	3 Reses	3,905,684,040	
4	2	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				366,798,000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				366,798,000	
4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	10 Pengawas an	216,798,000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Pengawa san	10 Pengawas an	216,798,000	
4	2	2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah				0	Pembahasan Kerja Sama Daerah				0	
4	2	2	2.07	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Kerjasam a	2 Kerjasam a	0	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Kerjasam a	2 Kerjasama	0	
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				11,700,881,457	Fasilitasi Tugas DPRD				11,700,881,457	

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Koordina si/ Konsulta si	96 Koordinasi / Konsultasi	8,455,822,000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Koordina si/ Konsulta si	96 Koordinasi / Konsultasi	8,455,822,000	
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	14 Rapat	200,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	14 Rapat	200,000,000	
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	96 Rapat	3,045,059,457	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Kukar	Jumlah Rapat	96 Rapat	3,045,059,457	
	•				TOTAL	•			106,581,786,414					106,581,786,414	

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Kutai kartanegara. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Table T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara **Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Sasaran target kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara lebih lanjut dijabarkan kedalam program kerja. Didalam setiap program kerja terdapat beberapa kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang berkaitan dengan maksud dan tujuan mendukung pencapaian target rincian dari sasaran yang ingin dicapai pada target kinerja didalam tahun perencanaan 2022, akan di jelaskan lebih lanjut.

Selanjutnya dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mendalam akan dijelaskan didalam Rencana Kerja Tahun 2022.

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2015 – 2019 adalah :

"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019 tersebut adalah:

- 1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, ke Bhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri
- 2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan
- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi 3. daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat
- 4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik
- 6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari misi Renstra Kemendagri tersebut yang sesuai dengan visi dan misi adalah di misi ke 2 dan 5.

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Adapun tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya kualitas fasilitas pelayanan publik
- 2. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kapabel dengan integritas yang tinggi
- 3. Terwujudnya system dan kualitas produk hukum daerah
- 4. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang integratif
- 5. Terwujudnya pengelolaan anggaran keuangan yang akuntabel

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, yang dilaksanakan satu Tahun kedepan untuk mencapai Sasaran Perencanaan Pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan sarana dan perasarana apatur
- 2. Meningkatkan dan mengembangkan kwalitas pelayanan publik
- 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur SKPD
- meningkatnya kedisiplinan aparatur 4.
- 5. Meningkatnya kinerja DPRD yang akuntabel
- Miningkatnya kualitas produk hukum yang sesuai dengan aspirasi 6. masyarakat

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- 7. Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
- Tersedianya sistem informasi 8. layanan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengawasan produk daerah
- 9. Tersedianya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2021, visi Perangkat Daerah telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu : Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra tahun 2016 – 2021. Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2022 menguraikan target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik Sekretariat DPRD Kabupaten

Kutai Kartanegara sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam tahun anggaran 2022 dalam perumusan program dan kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kinerjanya, disamping program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Renstra.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka diperlukan penyesuaian kegiatan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rencana kerja tahunan tahun 2022 dan target kegiatan tahun 2022 mengalami banyak perubahan baik dari jumlah program maupun jenis kegiatannya. Adapun jumlah kegiatan pada tahun 2022 terdiri dari :

- 1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 1 program, 10 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan.
- Untuk kegiatan non generik terdiri dari 1 program, 8 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan.
- Sehingga seluruhnya berjumlah 2 program, 18 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan 3.

Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, untuk menyikapi hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
- 2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas.
- 3. Menyesuaikan Dengan Berita Acara Kesepakatan Review Program RPJMD
- Adapun kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut: 4.
 - a. Prosentase Penyelenggara Rapat-Rapat yang Sesuai dengan Jadwal
 - b. Jumlah Peraturan Perundangan-udangan yang disahkan
 - c. Prosentase Responden Anggota DPRD yang Puas Atas Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun perincian kegiatan tahun 2022 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara

Unit Organisasi: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sub Unit Organisasi: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja		Rencana T	ahun 2022		Catatan	Prakiraan Ma	aju Rencana Tahun 2023
		K	ode	Dan Program/ Kegiatan	Program/Kegiat an /Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	2			SEKRETARIAT DPRD				106,581,786,414	APBD			106,581,786,414
4	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				72,794,861,815	APBD			72,794,861,815
4	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,261,066,663	APBD			1,261,066,663



4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	169,279,663	APBD	5 Dokumen	169,279,663
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	125,526,000	APBD	2 Dokumen	125,526,000
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Semua Kabupaten/K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	163,354,000	APBD	1 Dokumen	163,354,000
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	217,478,000	APBD	2 Dokumen	217,478,000
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	165,430,000	APBD	1 Dokumen	165,430,000



4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	250,101,000	APBD	2 Dokumen	250,101,000
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	169,898,000	APBD	2 Dokumen	169,898,000
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21,208,767,507	APBD		21,208,767,507
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	19,912,653,507	APBD	12 Bulan	19,912,653,507
4	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	128,832,000	APBD	2 Dokumen	128,832,000
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	6 Dokumen	119,728,000	APBD	6 Dokumen	119,728,000



							Semua Kelurahan					
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	50,000,000	APBD	6 Dokumen	50,000,000
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	138,926,000	APBD	6 Dokumen	138,926,000
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	858,628,000	APBD	12 Dokumen	858,628,000
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				279,394,000	APBD		279,394,000
4	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	279,394,000	APBD	1 Dokumen	279,394,000



							Semua Kelurahan					
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				369,301,000	APBD		369,301,000
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	305 Stel	0	APBD	305 Stel	0
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108 ASN	369,301,000	APBD	108 ASN	369,301,000
4	2	1	2.05	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Kegiatan Sosialisasi	0	APBD	15 Kegiatan Sosialisasi	0
4	2	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	20 Orang	0	APBD	20 Orang	0



							Semua Kelurahan					
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,908,680,400	APBD		2,908,680,400
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4028 Unit	664,515,400	APBD	4028 Unit	664,515,400
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi/kaleng/ke masan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9504 porsi/kaleng /kemasan	1,110,292,600	APBD	9504 porsi/kaleng /kemasan	1,110,292,600
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3180 Lembar	457,059,300	APBD	3180 Lembar	457,059,300
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38352 Eksemplar	176,813,100	APBD	38352 Eksemplar	176,813,100



4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang/Hari	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	218 Orang/Hari	350,000,000	APBD	218 Orang/Hari	350,000,000
4	2	1	2.06	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan		2 Kegiatan	150,000,000	APBD	2 Kegiatan	150,000,000
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,457,713,092	APBD		1,457,713,092
4	2	1	2.07	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	308 Unit	604,904,200	APBD	308 Unit	604,904,200
4	2	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1081 Unit	852,808,892	APBD	1081 Unit	852,808,892
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,836,753,898	APBD		7,836,753,898



4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 Surat	4,250,000	APBD	800 Surat	4,250,000
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Rekening	1,924,792,000	APBD	48 Rekening	1,924,792,000
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang/Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2448 Orang/Bula n	5,907,711,898	APBD	2448 Orang/Bulan	5,907,711,898
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,911,486,000	APBD		1,911,486,000
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	Semua Kabupaten/K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Kendaraan Dinas	341,810,250	APBD	47 Kendaraan Dinas	341,810,250



4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Kendaraan Dinas	342,312,150	APBD		47 Kendaraan Dinas	342,312,150
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	851,320,000	APBD		10 Unit	851,320,000
4	2	1	2.09	1	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Set/Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595 Set/Unit	376,043,600	APBD		595 Set/Unit	376,043,600
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				30,887,959,655	APBD			30,887,959,655
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Bulan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	30,480,883,455	APBD		12 Bulan	30,480,883,455
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Stel	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	520 Stel	407,076,200	APBD		520 Stel	407,076,200



							Semua Kelurahan					
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD				4,673,739,600	APBD		4,673,739,600
4	2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	150,000,000	APBD	1 Kegiatan	150,000,000
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	349 Rapat	3,267,656,600	APBD	349 Rapat	3,267,656,600
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Rumah Tangga	1,256,083,000	APBD	4 Rumah Tangga	1,256,083,000
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				33,786,924,599	APBD		33,786,924,599



4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				5,946,826,000	APBD		5,946,826,000
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Rapat	295,286,000	APBD	10 Rapat	295,286,000
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Raperda	419,366,000	APBD	24 Raperda	419,366,000
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Raperda	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Raperda	4,201,628,000	APBD	24 Raperda	4,201,628,000
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	1,030,546,000	APBD	8 Dokumen	1,030,546,000
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				1,050,000,000	APBD		1,050,000,000



4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Rapat	375,000,000	APBD	5 Rapat	375,000,000
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Rapat	375,000,000	APBD	5 Rapat	375,000,000
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Rapat	100,000,000	APBD	2 Rapat	100,000,000
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Rapat	100,000,000	APBD	2 Rapat	100,000,000
4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Rapat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Rapat	50,000,000	APBD	2 Rapat	50,000,000



4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rapat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Rapat	50,000,000	APBD	2 Rapat	50,000,000
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				4,750,000,000	APBD		4,750,000,000
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Pengawasan	750,000,000	APBD	36 Pengawasan	750,000,000
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Pengawasan	750,000,000	APBD	36 Pengawasan	750,000,000
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Pengawasan	750,000,000	APBD	36 Pengawasan	750,000,000



4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Pengawasan	750,000,000	APBD	36 Pengawasan	750,000,000
4	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Pengawasan	750,000,000	APBD	36 Pengawasan	750,000,000
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Pengawasan	400,000,000	APBD	4 Pengawasan	400,000,000
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Pengawasan	400,000,000	APBD	4 Pengawasan	400,000,000
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rapat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Rapat	200,000,000	APBD	2 Rapat	200,000,000



4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				5,924,447,000	APBD		5,924,447,000
4	2	2	2.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang	1,400,818,000	APBD	45 Orang	1,400,818,000
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Media	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Media	2,169,458,000	APBD	15 Media	2,169,458,000
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Orang	1,654,171,000	APBD	120 Orang	1,654,171,000
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Orang	325,000,000	APBD	7 Orang	325,000,000
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	1 Kegiatan	200,000,000	APBD	1 Kegiatan	200,000,000



							Semua Kelurahan					
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	175,000,000	APBD	1 Dokumen	175,000,000
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				4,047,972,142	APBD		4,047,972,142
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	142,288,102	APBD	2 Dokumen	142,288,102
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Reses	3,905,684,040	APBD	3 Reses	3,905,684,040
4	2	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				366,798,000	APBD		366,798,000



4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150,000,000	APBD	1 Dokumen	150,000,000
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Pengawasan	216,798,000	APBD	10 Pengawasan	216,798,000
4	2	2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah				0	APBD		0
4	2	2	2.07	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kerjasama	0	APBD	2 Kerjasama	0
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				11,700,881,457	APBD		11,700,881,457
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi/ Konsultasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Koordinasi/ Konsultasi	8,455,822,000	APBD	96 Koordinasi/ Konsultasi	8,455,822,000



4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Rapat	200,000,000	APBD	14 Rapat	200,000,000
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Rapat	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Rapat	3,045,059,457	APBD	96 Rapat	3,045,059,457
					то	TAL			106,581,786,414			106,581,786,414

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB. V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022, yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja (Renja) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- 1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh stakeholders termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021 dengan sebaik-baiknya.
- 2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
- 3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
- 4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
- 5. Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses

perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;

- 6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
- 7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka clean governentand good governance (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan)

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

> Tenggarong, Februari 2021

Sekretaris. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

H.M. Ridha Darmawan, .SP.MP.

Pembina Utama Muda NIP. 19701117 199803 1 008